

## DAFTAR PUSTAKA

- Buletin Teknis Nomor 04, tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. (2006).
- Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerepan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. (2013).
- Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2020).
- Mulyana, B. (2014). *BUKU SERI AKUNTANSI PEMERINTAH*. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 41 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. (2017).
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 43 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi. (2016).
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 63 Tahun 2014, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. (2014).
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 67 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. (2015).
- Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (2021).
- Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. (2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02, tentang Laporan Realisasi Anggaran. (2005).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03, tentang Laporan Arus Kas. (2004).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04, tentang Catatan atas Laporan Keuangan. (2005).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12, tentang Laporan Operasional. (2008).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. (2004).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. (2003).